

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peneliti berkesimpulan bahwa Hasil Pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara sejak Tahun 2006 dan baru terlaksana Tahun 2016 akibat dari adanya kendala dalam regulasi yaitu kendala dalam regulasi moratorium pemekaran desa sesuai dengan Edaran Surat Menteri nomor 140/418/PMD Tanggal 13 Januari 2012 yang ditindaklanjuti dengan surat Gubernur Sumatera Barat nomor 140/563/Pem-2012 tanggal 13 April 2012, penolakan pemekaran yang muncul dari Walinagari Batahan periode Tahun 2015-2019, serta penetapan batas wilayah yang tidak kunjung tuntas. Meskipun beragam permasalahan muncul, tidak menjadikan masyarakat dan pemerintah untuk berdiam diri. Ada beberapa faktor yang menguatkan Nagari Persiapan Batahan Utara mekar yaitu:

Faktor sosial muncul akibat jarak tempuh pelayanan yang dilalui untuk sampai ke Nagari Batahan ± 10 Km dengan waktu tempuh 2 jam, dengan rentang waktu yang lama akibat medan yang dilalui sulit, menjadikan ongkos pelayanan menjadi mahal dengan bayaran RP. 50.000/orang. Lama jarak tempuh yang dilalui diakibatkan oleh jaringan jalan mendominasi adalah tanah. Lokasi yang berada dalam kawasan hutan lindung dengan luas ± 5.128 Ha dan persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan rasa keamananan terancam untuk melakukan pelayanan ke nagari induk. Kinerja dari pihak pemberi jasa layanan juga belum efektif akibat sarana-prasarana pelayanan belum memadai.

Faktor ekonomi juga menjadi pemicu perlunya pemekaran di Nagari Persiapan Batahan Utara. Dana desa yang diterima Nagari Batahan Tahun 2016 sekitar Rp. 1,130,517,744. Dana desa yang berjumlah Rp. 1,130,517,744 dan diberikan kepada 26 jorong dengan proporsi jumlah penduduk yang padat menjadikan persoalan yang sangat pelik. Selain itu, Pendapatan Asli Nagari Batahan (PAN) yang tidak berdaya menjadikan pemasukan ke kas nagari menjadi kosong. Selain suntikan dana desa, maka pihak pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat juga memberikan dana dari 10% APBD, namun itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam (SDA) yang ada di Nagari Persiapan Batahan Utara berkembang di sektor sawit dengan penghasilan 15 ton/bulan. Namun, segala bentuk kekayaan yang dimiliki dikuasai oleh pihak swasta dan terus menerus melilit masyarakat dalam lingkaran kemiskinan.

Faktor politik menjadi suatu arena untuk mempertaruhkan upaya pendefinitifan Pemekaran nagari Persiapan Batahan Utara. Kebijakan politik berupa pemekaran perlu disiasati dengan bantuan elite politik baik tingkat nagari maupun pihak daerah. Tujuan dengan adanya wilayah administrasi baru akan membuka peluang untuk mengisi jabatan di kelembagaan baru. Masyarakat nagari yang semula lebih mencari kerja di luar nagari, akan terserap kembali dengan adanya lowongan kerja baru dan itu dibutuhkan untuk melakukan penataan nagari.

Tabel 5.9
Gambaran Faktor Pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara

No	Teori Faktor Pemekaran dari Fitrani dkk (faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik)	Hasil Analisis Faktor Pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara
1.	Faktor Sosial	<ul style="list-style-type: none"> -Jarak tempuh ±10 KM memakan waktu 2 jam perjalan ke Nagari Batahan. -Biaya ongkos perjalanan untuk pelayanan ke Nagari Batahan yang mahal Rp. 50.000/ 1 kali. -Terancamnya keamanan untuk melakukan pelayanan ke Nagari Batahan karena berada di kawasan hutan lindung dengan luas ±5.128 Ha. -Jumlah penduduk yang padat terdiri dari 815 kartu keluarga dan 2.598 jiwa. -Kualitas tekonologi seperti pelayanan online sulit diterapkan karena laptop dan komputer hanya 7 buah dan jaringan internet tidak mendukung.
2.	Faktor Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> -Jumlah dana desa yang sedikit pada Tahun 2016 sekitar Rp. 1.131.517.744 M yang di alokasikan terhadap 26 jorong. -Pendapatan Asli Nagari (PAN) Batahan tidak ada (kosong) -Penyaluran dana desa yang bertahap 60%+40% memperlambat penataan. -Bantuan dana desa yang didapatkan oleh Nagari Persiapan Batahan Utara Tahun 2016-2019 hanya 3 kali yaitu: bantuan bronjong sungai di Jorong Silayang Julu, jalan beton di Jorong Pangaran Tengah, dan gedung TK di Jorong Tanjung Larangan. -Sumber daya alam (SDA) sawit yang dieksploitasi oleh pihak swasta
3.	Faktor Politik	<ul style="list-style-type: none"> -Keinginan mekar dimulai Tahun 2006 dan terealisasikan Tahun 2016 atas prakarsa masyarakat dan bantuan elite pemerintah. -Penyerapan tenaga kerja baru yang berasal dari anak nagari sesuai prosedur yang berlaku.

Sumber: Data Primer diolah peneliti dari Nagari Persiapan Batahan Utara Tahun 2020

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Faktor Pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat agar lebih jelas dalam menganalisis faktor dari pemekaran nagari maka disarankan dan direkomendasikan:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat selaku pihak penyelenggara atas pemekaran 71 nagari persiapan masih memiliki catatan dalam pemandirian nagari. Pihak pemda seharusnya lebih ketat dan teliti dalam memenuhi persyaratan pemekaran nagari agar tidak terjadi kesalahan yang sama akibat peta wilayah dan jumlah penduduk tidak sesuai yang diberikan kepada tim pemekaran pusat. Selanjutnya, pemda juga memiliki peran untuk mengarahkan dan mengembangkan pemerintah nagari untuk bisa mandiri dengan mendayagunakan kembali BUMNag. Bantuan terhadap sarana-prasarana pelayanan perlu ditingkatkan untuk menghemat waktu layanan.

2. Pemerintah Nagari

Pemerintah Nagari Batahan perlu melakukan pembenahan dari segi kualitas pembangunan untuk Nagari Persiapan Batahan Utara. Bantuan akses jalan sangat dibutuhkan dan perlu dirampungkan dalam RPJM nagari jangka panjang. Selanjutnya, pemerintah Nagari Batahan perlu untuk memfasilitasi pembukaan pasar nagari, agar perekonomian dari Nagari Persiapan Batahan Utara kembali berjalan dengan baik. Pembiaran

pemberian kebebasan penggunaan lahan perkebunan dari Nagari Persiapan Batahan Utara perlu untuk ditindaklanjuti, agar tanah sendiri tidak dikuasai pihak swasta semena-mena.

3. Masyarakat Nagari

Masyarakat Nagari Persiapan Batahan Utara perlu meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Nagari Batahan. Masyarakat perlu untuk lebih aktif melakukan pelayanan. Diharapkan juga terhadap masyarakat agar lebih giat untuk menggali informasi dengan pihak nagari dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan rapat nagari. Masyarakat juga perlu lebih terbuka terhadap pemerintah Nagari Batahan untuk menyampaikan kendala-kendala yang ada dalam nagari.